

BAB IV

PENYEBAB RENGGANNYA HUBUNGAN FILIPINA DAN AMERIKA SERIKAT DI ERA PRESIDEN RODRIGO DUTERTE

Politik luar negeri suatu Negara tidak lepas dari faktor-faktor yang kompleks dalam konstelasinya. Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton dalam bukunya yang berjudul *The International Relations Dictionary* yang mengemukakan bahwa politik luar negeri merupakan sebuah strategi atau tindakan yang dirumuskan oleh para pembuat kebijakan terhadap negara atau entitas internasional lain. Sedangkan menurut William D. Coplin politik luar negeri merupakan upaya suatu negara untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya, untuk itu terdapat beberapa aspek yang perlu diketahui untuk memahami cara pengambilan keputusan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap sebuah isu Politik luar negeri juga dianggap sebagai sebuah respon suatu negara terhadap tindakan yang dilakukan oleh negara lain. Dalam proses pembuatannya tentu terdapat beberapa determinan yang melatarbelakangi para pemimpin atau pembuat kebijakan membuat sebuah keputusan politik luar negeri. Pada BAB IV ini penulis akan melakukan analisis mendalam berkaitan dengan determinan-determinan yang mempengaruhi pengambilan kebijakan politik luar negeri Filipina terhadap AS di era pemerintahan Duterte berdasarkan pada konsep yang diajukan oleh Coplin.

A. Kondisi Politik Domestik Filipina

Dalam Konsep Politik Luar Negeri yang diajukan oleh Coplin, kondisi politik dalam negeri menjadi determinan utama yang menjadi dasar untuk terwujudnya sebuah kebijakan politik luar negeri. Politik domestik menjadi dasar untuk bertindak, hal tersebut karena *national interest* (kepentingan nasional) sebuah Negara merupakan

akumulasi dari politik domestik dan pemerintahan yang berkuasa saat itu. Perubahan rezim dari Presiden Benigno Aquino III ke Presiden Rodrigo Duterte tentu saja merubah konstelasi Politik dalam negeri Filipina, begitupun dengan kepentingan nasional yang ingin dicapai oleh Pemerintah Filipina yang berkuasa pun tentu saja mengalami perubahan. Berikut penulis jelaskan tentang kebijakan-kebijakan dalam negeri Filipina di era Presiden Duterte yang menjadi landasan dalam pengambilan kebijakan politik luar negerinya.

1. Kebijakan War on Drugs Duterte

Permasalahan Narkoba sebenarnya tidak hanya dihadapi oleh Filipina saja, tetapi hampir seluruh negara-negara berkembang di berbagai belahan dunia. Narkoba menjadi dalang dari tingginya tingkat kriminalisme di Filipina, baik disebabkan oleh pengguna maupun disebabkan oleh geng-geng Narkoba yang marak di Filipina. Sehingga tidak mengherankan jika Duterte dalam kampanyenya di Pemilihan Presiden Filipina tahun 2016 menjadi *War on Drugs* (Perang Melawan Narkoba) menjadi misi utama yang akan dilaksanakan dengan segala upaya. Duterte berdalih bahwa Ia tidak ingin Filipina menjadi Negara gagal hanya karena generasi mudanya terpengaruh oleh Narkoba. Kebijakan ini sebenarnya tidak baru bagi Duterte, karena ketika menjabat sebagai Walikota Davao Ia juga pernah membuat kebijakan serupa tetapi dengan skala yang lebih kecil.

Letak geografis Filipina yang strategis menyebabkan Filipina menjadi salah satu negara tujuan perdagangan internasional yang salah satunya adalah perdagangan narkoba. Pada tahun 2016, ketika proses pemilihan presiden Filipina, dua kandidat presiden yaitu Rodrigo Duterte dan Alan Peter Cayetano sama-sama berpendapat bahwa kejahatan

dan narkoba adalah penyakit sosial yang perlu diberi label. Mereka menyoroti perang melawan kriminalitas dan obat-obatan sebagai bagian utama dari platform mereka. Melihat bagaimana para calon presiden sangat memperhatikan keterkaitan antara kejahatan dan narkoba mengindikasikan adanya persoalan yang serius terkait narkoba di Filipina yang menyebabkan tingkat kejahatan meningkat. Mengkaji mengenai kriminalitas di Filipina, diketahui jumlah kejahatan meningkat di Filipina sementara kemampuan polisi untuk menyelesaikan kejahatan menurun. Pada tahun 2015, menurut Kepolisian Nasional Filipina (PNP), jumlah kejahatan yang dilaporkan meningkat sebesar 46% dalam 5 bulan pertama dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Kecenderungan yang sama diamati pada tahun 2014. Pada akhir 5 bulan pertama tahun itu, insiden kejahatan meningkat sebesar 18% dibandingkan angka kriminalitas pada tahun 2013.

Tabel 1. 1 Jumlah Kriminalitas di Filipina

	2012	2013	2014
Total reported Crimes	217,812	1,033,833	1,161,188
Index crimes	129,161	457,944	492,772
Crime rate (per 100k population)	226	1,053	1,004

Sumber: (Ranada, 2016)

Perang terhadap narkoba jadi jualan utama Duterte selama kampanye dan rupanya sukses besar untuk mengantarkannya sebagai Presiden Filipina ke-16. Duterte menepati janjinya. Usai dilantik pada 30 Juni 2016, per 1 Juli di tahun yang sama Ia mulai menerjunkan aparat kepolisian untuk menyerbu sarang pengedar dan menangkap pengguna dengan kekerasan yang tak main-main. Jika melawan, taruhannya eksekusi ekstra yudisial (*extrajudicial killing*). Metode ini kemudian ditiru oleh kelompok *vigilante* di seluruh negeri yang seakan mendapat legitimasi dari sang Presiden baru. Pengadilan bukan lagi dianggap sebagai lembaga yang diandalkan. Duterte dan barisan pendukungnya pun rajin memaki dan mencibir beragam kritik atas kebijakannya yang didasarkan pada prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu hasil positif yang dirasakan oleh masyarakat Filipina dari kebijakan *War on Drugs* ini adalah kejahatan turun lebih dari seperlima di Filipina tahun 2017. Hal yang menggembirakan bagi masyarakat dan memberi indikasi bahwa kampanye anti-narkoba Presiden Duterte yang menimbulkan kemarahan internasional karena masalah Hak Asasi Manusia (HAM) ternyata dapat mencegah tindak kejahatan di masyarakat. Tindak kejahatan terhadap manusia dan harta benda menurun 21,8 persen dari Januari sampai akhir November tahun 2017, dibanding periode yang sama tahun 2016, demikian menurut data Angkatan kepolisian Nasional Filipina yang dikutip media dalam negeri. Data tersebut menunjukkan kemajuan dalam kampanye anti-narkoba Duterte yang kontroversial serta keseluruhan usaha kepolisian, kata Antonio Contreras, ilmuwan politik di Universitas De La Salle di Filipina. Menurut Antonio ini adalah penurunan besar, jadi ini merupakan indikasi bahwa

usaha pemerintah berhasil¹.

Kebijakan anti-kejahatan Duterte fokus pada janji kampanyenya untuk menyelesaikan masalah peredaran Narkoba dalam jangka waktu enam bulan nyatanya memang menakutkan. Baru sebulan berkuasa 400 tersangka pengedar dan pengguna narkoba tewas, sebagian besar karena baku tembak dengan polisi. Sementara lebih dari 4.400 tersangka ditahan. Situasi ini ternyata membuat takut para pengedar dan pengguna narkoba sehingga sekitar 500.000 orang memilih menyerahkan diri kepada polisi. Di antara mereka yang menyerah karena takut ditembak mati adalah tiga orang wali kota dan seorang mantan wali kota yang berasal dari provinsi Maguindanao, wilayah selatan Filipina. Kemudian Duterte mengatakan, Ia tengah mempertimbangkan pendirian pusat rehabilitasi di kamp-kamp militer negeri itu untuk menampung para pengguna narkoba yang menyerah².

Presiden Duterte mendapatkan penilaian bagus dalam sebuah jejak pendapat untuk 90 hari pertama sebagai pemimpin negara Filipina, terutama berkat perang totalnya melawan Narkoba dan pernyataan pedasnya terhadap para pemimpin Barat, baik itu AS maupun Eropa. Tercatat hanya 11 persen dari 1.200 warga Filipina yang disurvei oleh badan *Social Weather Stations (SWS)* yang mengaku tidak puas atas kinerja Duterte. Dengan demikian Duterte mendapatkan tingkat kepuasan 64 persen sehingga

¹ VOA Indonesia. (2017, Desember 27). *Kejahatan Turun Lebih dari 20 Persen di Filipina*. Retrieved Juni 8, 2019, from <https://www.voaindonesia.com/a/kejahatan-turun-lebih-dari-20-persen-di-filipina/4180978.html>

² Kompas. (2016, Agustus 15). *Takut Ditembak Mati, 500.000 Pengedar dan Pengguna Narkoba di Filipina Menyerah*. Retrieved Juni 9, 2019, from <https://internasional.kompas.com/read/2016/08/05/21304401/takut.dite.mbak.mati.500.000.pengedar.dan.pengguna.narkoba.di.filipina.menyerah>

mencatat awal pemerintahan yang lebih baik daripada pendahulunya yaitu Benigno Aquino, Joseph Estrada, sampai Gloria Macapagal Arroyo.

Sebuah survei serupa oleh *Pulse Asia*, sekitar satu bulan setelah Duterte mulai berkuasa pada 30 Juni mencatat angka kepercayaan publik 91 persen untuk kepemimpinan Duterte. Duterte memenangkan Pemilihan Presiden Filipina pada 9 Mei 2016 dengan selisih suara sangat besar setelah berjanji memperluas kampanye pemberantasan kejahatan yang sudah Ia rintis sejak menjadi walikota Davao sehingga Ia digelar "*Duterte Harry*" (Si Penghukum) yang diambil dari judul film *Dirty Harry*. Analisis politik Nelson Navarro menyebut survei SWS itu sebagai bukti rakyat Filipina merasa lebih aman karena Duterte menepati janjinya untuk perang melawan kriminal dan Narkoba. Sikap kerasnya telah membuatnya populer di seluruh penjuru Filipina. Dari jejak pendapat SWS itu yang mengatakan Duterte "hebat" diatas 70 persen, sedangkan yang menyebutnya "sangat bagus" ada 50-69 persen (Sidik, 2016).

Dengan besarnya dukungan dan kepuasan atas awal masa pemerintahannya, hal tersebutlah yang membuat Presiden Duterte merasa memiliki legitimasi yang kuat dalam politik dalam negeri Filipina. Hasil Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden Filipina tahun 2016 menunjukkan bahwa di dalam Pemerintahan Filipina saat ini Duterte memiliki posisi yang kuat, sehingga Duterte tidak takut untuk membuat kebijakan yang terkesan kontroversial. Salah satu kebijakan yang kontroversial adalah merenggangkan hubungan luar negeri dengan AS yang notabene merupakan Sekutu dari negara Filipina dalam beberapa dekade terakhir.

Hal yang membuat Duterte tidak suka dengan AS adalah kritikan mereka terhadap kebijakan *War on*

Drugs yang dilakukan oleh Duterte. AS sebagai salah satu Negara utama penyangga PBB dan salah satu Negara yang memegang Hak Veto merasa perlu untuk menjamin Hak Asasi Manusia (HAM) di seluruh penjuru dunia. Tetapi inilah yang membuat Duterte berang dan merasa didikte oleh AS dalam kebijakan dalam negeri Filipina. Bahkan dalam beberapa kesempatan Duterte tidak segan untuk memaki AS dan Presiden Obama, salah satunya adalah saat kunjungan Presiden Duterte ke Jepang tahun 2017. Ketika itu Presiden Duterte juga mengancam untuk memutuskan hubungan dengan AS (Berita Satu, 2016).

2. Filipina Mengalami Duterte Sentris

Pasca Pemilihan Presiden Filipina dan terpilihnya Rodrigo Duterte sebagai Presiden baru Filipina ke 16 terjadi suatu perubahan besar dalam politik dalam negeri Filipina. Hal tersebut tidak lepas dari keberhasilan Duterte dalam menunaikan janji-janji politiknya pada saat masa Pemilihan Presiden tahun 2016. Dalam waktu relatif singkat Duterte berhasil menekan tingkat kriminalitas di Filipina, perbaikan layanan publik, dan kestabilan perekonomian Filipina. Meskipun dalam pelaksanaan kebijakannya menimbulkan kontroversial dan kecaman dunia internasional terutama dalam kebijakan *War on Drugs* yang mengizinkan adanya *Extrajudicial Killing* terhadap pengguna dan pengedar Narkoba.

Berkat beberapa keberhasilannya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan klasik di Filipina, Presiden Duterte memiliki tingkat kepuasan publik dan kepercayaan publik yang begitu tinggi. Sikap tegas dan kerasnya terhadap pemimpin-pemimpin Barat (AS dan Eropa) terhadap kritik dan campur tangan mereka terhadap kebijakan dalam negeri Filipina membuat Presiden Duterte sangat

disukai oleh rakyat Filipina. Hal ini lah yang kemudian Penulis sebagai *Duterte centris* yang sedang melanda Filipina. Pada masa Pemerintahannya, Duterte kerap kali melontarkan kritikan kepada lawan politik, Senator, bahkan Pihak gereja Katolik Filipina yang tidak sependapatnya. Duterte juga kerap membuat pernyataan dan kebijakan luar negeri yang didasarkan pada naluri.

Presiden Duterte pernah berkonfrontasi dengan anggota Parlemen Filipina karena anggota parlemen tersebut memberikan kritik terhadap kebijakan *War on Drugs* Duterte. Selain itu, Presiden Duterte juga berkonfrontasi dengan pihak Gereja Katolik Filipina karena membela para pengguna Narkoba dan Presiden Duterte pernah menyebut Tuhan itu bodoh. Bahkan untuk memprovokasi pihak Gereja Katolik, Presiden Duterte pernah mengatakan bahwa sebenarnya Ia adalah bagian dari Islam dan meneriakan takbir "*Allahuakbar*". Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa faktanya Ibu dari Presiden Duterte merupakan berasal dari suku Bangsamoro, suku yang mayoritas Islam yang mendiami wilayah Selatan Filipina.

Presiden Duterte seperti anti-kritik dalam menjalankan Pemerintahannya, bahkan Wakil Presiden Filipina saat ini pun harus melakukan kritikan terhadap kebijakan Presiden Duterte dari luar Pemerintahan atau melalui media. Pemerintah daerah dan sebagian rakyat yang kurang suka terhadap kebijakan Presiden Duterte pun tidak berani untuk bersuara lantang, mereka khawatir akan keselamatan terhadap nyawa dan keluarga mereka. Hal tersebut karena bisa saja mereka diserang oleh kelompok *vigilante* dengan tuduhan mendukung atau berkelompok dengan geng, pemakai, atau pengedar Narkoba.

Sehingga tidak mengherankan jika dalam pengambilan kebijakan luar negeri pun Presiden

Duterte sangat anti-kritik, salah satunya yaitu menjaga jarak dengan AS yang mengkritisi kebijakan *War on Drugs* yang dikeluarkan Presiden Duterte dan lebih mendekatkan diri terhadap Tiongkok karena lebih mendukung kebijakan tersebut dan tidak berusaha mendikte kebijakan dalam negeri Filipina. Hal ini lah yang memicu gejolak dalam hubungan bilateral antara Filipina dan AS yang menciptakan ketidakharmonisan dalam beberapa tahun ke belakang.

B. Kondisi Ekonomi dan Militer Filipina

Determinan kedua dalam Politik Luar Negeri menurut Konsep Coplin adalah kondisi ekonomi dan militer suatu Negara. Tidak dapat dipungkiri bahwa ekonomi dan militer adalah komponen yang perlu diperhatikan untuk menentukan *power* suatu Negara dalam percaturan politik internasional. Semakin kuat ekonomi dan militer suatu Negara, maka akan semakin kuat pula posisi nilai tawar mereka dalam hubungan internasional baik dalam kerja sama bilateral maupun multilateral. Sebaliknya, bagi Negara yang memiliki kondisi ekonomi dan militer yang tidak begitu kuat dan stabil, maka negara-negara tersebut harus mencari *alliance* kepada Negara-negara yang memiliki *power* dalam bidang ekonomi dan militer. Hal tersebut tercermin dari apa yang dialami dan dilakukan oleh Filipina sebagai Negara yang tidak memiliki *power* yang kuat dalam kedua sektor tersebut.

1. Kondisi Ekonomi Filipina

Pada beberapa tahun terakhir ini ekonomi Filipina memang tumbuh lebih cepat dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara, hal tersebut menurut para ahli merupakan hasil berkat diplomasi yang lebih kuat Filipina dengan Tiongkok dan Jepang, serta meningkatnya pembelanjaan dalam bidang infrastruktur dan industri *call center*. Total nilai barang dan jasa di Filipina naik 6.7 persen

tahun 2016, menurut perkiraan pemerintah Filipina. Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan ekonomi Filipina bernilai 311 Miliar Dolar. Juru bicara presiden Filipina, Ernesto Abella mengutip pencapaian dalam kemitraan luar negeri sebagai alasan bangkitnya pertumbuhan ekonomi. Sejak menjabat bulan Juni 2016, Presiden Rodrigo Duterte telah menjalin ikatan baru dengan Tiongkok dan mempererat ikatan dengan investor Jepang.

Bulan Oktober 2017, Presiden Duterte mengunjungi kepala-kepala negara di Tiongkok dan Jepang sebagai bagian dari kebijakannya untuk mengurangi ketergantungan dengan AS yang merupakan bekas koloni Filipina. Tiongkok menjanjikan bantuan bernilai 24 miliar Dolar dan para ekonom memperkirakan Jepang akan berinvestasi di pabrik-pabrik serta mendanai proyek-proyek pembangunan. Tahun 2017, Presiden Duterte akan mengepalai ASEAN, sebuah organisasi multilateral yang beranggotakan 10 negara Asia Tenggara dan juru bicaranya mengatakan kepada media setempat bahwa peran itu akan membantu Presiden Duterte dalam membentuk lebih banyak kemitraan luar negeri³.

Filipina sempat mendapatkan label sebagai “negara pesakitan di Asia”, namun Filipina kini bangkit dan berlari meninggalkan tetangganya di Asia Tenggara. Mereka menjelma menjadi macan ekonomi Asia berkat tingkat pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Melansir dari Bloomberg, kebangkitan Filipina dimulai dengan mantan Presiden Benigno Aquino, yang mulai menjabat pada

³ VOA Indonesia. (2016, 12 30). *Pertumbuhan Ekonomi Filipina Tercepat di Asia Tenggara*. Retrieved Juni 11, 2019, from <https://www.voaindonesia.com/a/pertumbuhan-ekonomi-filipina-tercepat-di-asia-tenggara/3656818.html>

2010, dengan memberantas korupsi, mengangkat pendapatan kelas menengah, dan meningkatkan peringkat kredit investasi untuk pertama kalinya. Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi Filipina akan mencapai lebih 6% sampai 2019, mirip saat pesatnya ekonomi Malaysia dan Thailand pada dekade 1990-an. Data Bank Dunia yang dirilis ini, menunjukkan pertumbuhan ekonomi Filipina pada 2016 sebesar 6,8%.

Filipina mendapat keuntungan dengan populasi penduduk muda yang meningkat dan produktif, sehingga membantu meningkatkan produksi yang ujung-ujungnya meningkatkan jumlah kelas menengah di negara tersebut. Sementara itu, di bawah pimpinan Presiden Duterte, Filipina sedang dan akan mengembangkan proyek infrastruktur dengan nilai ambisius 160 miliar Dolar atau setara Rp2.136 Triliun. Mereka juga mendorong masuknya investasi lebih besar dari Tiongkok, Rusia, dan Timur Tengah. Frederic Neumann, wakil kepala penelitian ekonomi Asia di HSBC Holdings Plc di Hong Kong mengatakan bahwa mereka melihat transformasi kuat di Filipina, yaitu Administrasi baru (Pemerintahan Duterte) yang bekerja keras memastikan stabilitas makro-ekonomi sebagai jangkarnya yang membuat perekonomian lebih maju bagi Filipina.

Saat ini ukuran ekonomi Filipina mencapai 292 miliar Dolar, lebih dari dua kali ukuran Malaysia dan 10 kali lebih besar dari Singapura pada 1960. Bank Pembangunan Asia (ADB) menyatakan bahwa pendapatan per kapita per tahun di Filipina kini mencapai 4.126 Dolar atau setara Rp 55 juta, sama seperti di Tiongkok, Malaysia, dan Thailand. ADB mengatakan Filipina juga sukses meningkatkan manufaktur sebagai kunci dalam penyediaan lapangan kerja lebih banyak. Pasalnya,

Filipina sangat menggantungkan dari ekspor di kawasan. Adapun belanja rumah tangga meningkat sekitar 70% dari produk domestik bruto, naik lebih dari 6%. Ekonomi Filipina lepas landas seperti Thailand dan Malaysia yang membangun manufaktur mereka. Mereka juga melakukan perbaikan infrastruktur dan menarik lebih banyak investasi asing.

Investasi langsung asing (*foreign direct investment/FDI*) ke Filipina melonjak lebih dari lima kali lipat sepanjang 2010-2015 menjadi 5,8 miliar Dolar, meski masih kalah dibandingkan Thailand 9 miliar Dolar dan Malaysia 11 miliar Dolar. Untuk bersaing, Duterte berencana meningkatkan belanja infrastruktur sampai 7% dari PDB, lebih tinggi dari sebelumnya, sebesar 5%. Presiden Duterte juga mendorong perubahan undang-undang pajak untuk meningkatkan pendapatan negara. Jika Filipina berhasil mendorong reformasi pajak dan meningkatkan belanja infrastruktur, manufaktur menjadi penopang berikutnya dari pertumbuhan ekonomi dan menambah pemasukan masuk bagi Filipina, kata Michael Wan, ekonom Credit Suisse Group AG di Singapura. Wan pun memperkirakan hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Filipina hingga 7% pada tahun-tahun mendatang⁴.

Bank Sentral Filipina masih meyakini kebijakan moneter saat ini masih sesuai dengan perkembangan yang ada. Ekonom memandang peningkatan harga imbas dari kuatnya permintaan memungkinkan adanya pengetatan kebijakan ke depan. Para ekonom juga sempat mengkhawatirkan

⁴ Ventura, B. (2017, Januari 26). *Pertumbuhan Tercepat di Dunia, Filipina Macan Ekonomi Asia*. Retrieved Juni 11, 2019, from <https://ekbis.sindonews.com/read/1174418/35/pertumbuhan-tercepat-di-dunia-filipina-macan-ekonomi-asia-1485417043>

kebijakan yang diambil oleh Presiden Duterte yang melarang keras peredaran obat-obatan terlarang dan *War on Drugs* dapat membebani sentimen investor. Tetapi Presiden Duterte dapat mengembalikan kepercayaan para investor dengan berkomitmen untuk mengembangkan bandara, jalan, kereta api, dan pelabuhan selama 6 tahun ke depan senilai 180 miliar Dolar. Langkah ini dilakukan untuk menarik langsung investasi langsung yang berimbas ke pertumbuhan ekonomi Filipina⁵.

2. Kondisi Militer Filipina

Filipina bukanlah Negara dengan kekuatan militer yang besar, bahkan di Asia Tenggara pun Filipina menempati urutan bawah dalam hal kekuatan militer. Sehingga Filipina harus membuat kerja sama militer dengan Negara lain, yaitu AS. Kompensasinya adalah Filipina harus mau memberikan izin wilayahnya yang dijadikan pangkalan ataupun lokasi kerja sama pertahanan dengan AS dalam konteks *US military dispositions in the Western Pacific*. Dalam *The Military Balance 2017* terbitan *The International Institute for Strategic Studies* menyebutkan bahwa Filipina juga memberikan tempatnya bagi Angkatan Udara AS di Clark Air Base, serta bagi pasukan Marinir AS di Camp Aguinaldo. Pentingnya kawasan Asia Tenggara tersebut terutama karena ada isu mengenai sengketa Laut China Selatan.

Dalam *Index Power* yang dirilis *Global Fire Power* pada 2017, di kawasan Asia Tenggara, Filipina menempati posisi ke enam. *Index Power*

⁵ Chandra, A. A. (2017, November 17). Ekonomi Filipina Tumbuh 6,9% di Kuartal III-2017. Retrieved Juni 12, 2019, from <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3731458/ekonomi-filipina-tumbuh-69-di-kuartal-iii-2017>

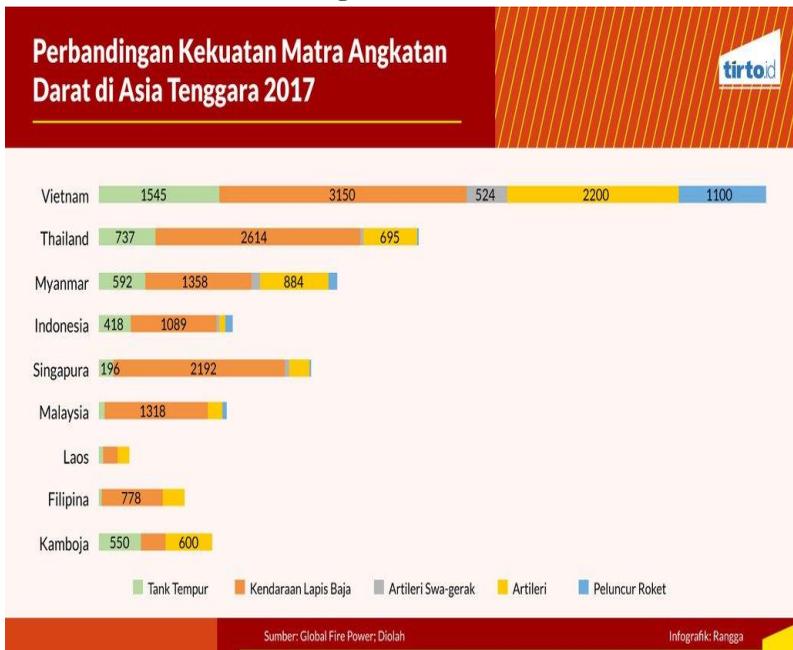
tersebut pada dasarnya merupakan nilai gabungan dari berbagai variabel: jumlah personel militer, kekuatan alutsista, anggaran, nilai utang suatu negara, geografi wilayah, dan sebagainya. Nilai yang semakin kecil dalam *Index Power* tersebut berarti semakin baik kekuatan militernya. Negara dengan skor indeks yang bagus belum tentu kuat dalam soal alutsista. Atau, sebaliknya, negara dengan skor rendah belum tentu sedikit proporsi jumlah personel sumber daya militernya. Untuk mendapatkan gambaran kekuatan militer yang sebenarnya, memang tidak dapat hanya dilihat berdasarkan skor, tetapi perlu melihat secara mendalam setiap komponennya (Noah Friedman, 2017). Berikut merupakan info gambar terkait *Index Power* Negara-negara ASEAN :

Gambar 1.1 Skor *Index Power* Negara- Negara ASEAN



Selain dari sisi personel militer, kekuatan militer juga terlihat dari alutsista yang dimiliki oleh suatu negara. Kekuatan alutsista militer sendiri dapat dibagi berdasarkan matranya. Ada matra angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara. Tidak semua negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekuatan militer yang merata untuk semua level matra tersebut. Bahkan, kecenderungannya, matra angkatan darat menjadi kekuatan militer yang dominan di kawasan, sekalipun negara seperti Filipina adalah negara kepulauan, yang idealnya, kekuatan matra angkatan laut harusnya perlu menjadi kekuatan militer utama.

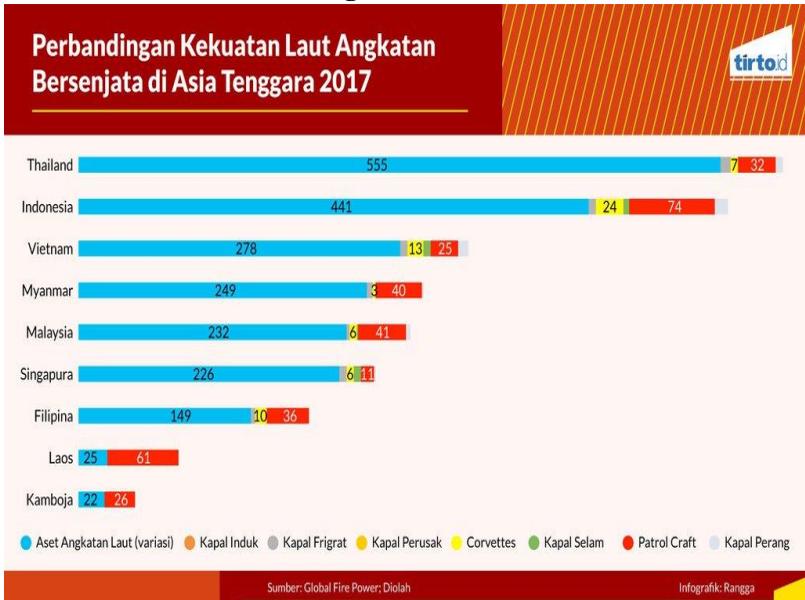
Gambar 1.2 Kekuatan Angkatan Darat Negara-Negara ASEAN



Dari analisa perbandingan menggunakan data *Global Fire Power*, kekuatan matra angkatan darat

yang dominan di Asia Tenggara adalah dari negara Vietnam. Vietnam menduduki posisi utama dalam soal alutsista matra angkatan darat dengan memiliki 1.545 tank tempur, 3.150 kendaraan lapis baja, 524 artileri swa-gerak, 2.200 artileri dan 1.100 peluncur roket. Sementara Indonesia, wilayah yang luasnya jauh lebih besar daripada Vietnam, berada di posisi keempat dengan 418 tank tempur, 1.089 kendaraan lapis baja, 37 artileri swa-gerak, 80 artileri dan 86 peluncur roket. Sedangkan Filipina hanya menempati posisi ke delapan.

Gambar 1.3 Kekuatan Angkatan Laut Negara-Negara ASEAN



Untuk kekuatan matra angkatan laut, diketahui Thailand memiliki alutsista yang lebih unggul di Kawasan ASEAN. Sekalipun, luas wilayah lautannya tidak terlalu besar, tapi Thailand memiliki 1 kapal induk, 8 kapal Frigat, 7

corvettes, 32 kapal patroli dan 7 kapal perang. Sementara Filipina hanya memiliki 149 Aset Angkatan Laut (Variasi), 10 corvettes, 36 kapal patroli. Bahkan, Filipina yang memiliki wilayah laut yang luas sama sekali tidak memiliki kapal induk.

Kekuatan alutsista angkatan udara pun, di Kawasan Asia Tenggara pun dikuasai oleh Thailand. Dimana Thailand tercatat memiliki 76 pesawat tempur, 95 pesawat penyerang, 327 pesawat angkut, 154 pesawat latih dan 7 helikopter penyerang. Sementara Filipina, hanya memiliki 8 pesawat tempur, 74 pesawat angkut, 22 pesawat latih dan 149 Aset Angkatan Udara (variasi). Adanya sengketa Laut Cina Selatan, kehadiran militer AS ataupun kebutuhan peningkatan kekuatan militer untuk keperluan dalam negeri akhirnya memunculkan ketergantungan impor alutsista di negara-negara Asia Tenggara. Pada kurun 2015-2016, Vietnam menjadi negara yang paling tinggi dalam soal impor alutsista di Asia Tenggara.

Gambar 1.3 Kekuatan Angkatan Udara Negera-Negera ASEAN



Hal ini memberi gambaran bahwa kekuatan militer Filipina diantara negara-negara di Asia Tenggara pun masih tertinggal jauh. Data secara umum soal *Index Power* dari *Global Fire Power* yang menempatkan Filipina dalam posisi ke enam di Asia Tenggara menjadikan kita paham bahwa Filipina memang membutuhkan aliansi atau kerja sama militer dengan Negara-negara yang memiliki kekuatan besar dalam bidang militer, sehingga kekuatan militer memang menjadi salah satu determinan dalam pembuatan kebijakan luar negeri dari setiap Negara. Dengan adanya ancaman stabilitas kawasan, terutama menyangkut kehadiran militer dari kawasan lainnya ataupun peningkatan kekuatan demi aspek keamanan dalam negeri, maka perlombaan impor alutsista cenderung akan menjadi aspek pertama dalam kompetisi militer dalam kawasan⁶.

C. Determinan dari Konteks Internasional

Konteks Internasional menjadi determinan ketiga dalam Konsep Politik Luar Negeri Coplin, bagi Negara yang bukan merupakan Negara *Super Power* dalam konstelasi politik internasional maka konteks internasional menjadi penting dalam pertimbangan untuk menentukan sebuah kebijakan luar negeri. Hal yang sedang menjadi isu hangat dalam dunia internasional tentu saja akan menjadi pertimbangan yang harus diperhitungkan dalam langkah untuk membuat sebuah kebijakan luar negeri. Pada saat Presiden Duterte terpilih menjadi 2016 lalu, isu yang sedang hangat adalah persaingan antara Tiongkok dan AS untuk meraih dukungan dan pengaruh Negara-negara dunia, sehingga hal tersebut menurut Penulis menjadi suatu hal yang patut untuk dibahas dalam determinan konteks

⁶ Kurniawan, F. (2017, Oktober 17). *Siapa Militer Terkuat di Asia Tenggara?* Retrieved Juni 12, 2019, from <https://tirto.id/siapa-militer-terkuat-di-asia-tenggara-cyfb>

internasional bagi politik luar negeri Filipina di era Presiden Duterte.

1. Perebutan Pengaruh dan Hegemoni antara Tiongkok vs AS

Pada era ini tidak dapat dipungkiri bahwa dunia internasional kembali terpolarisasi terhadap dua kutub, yaitu AS dan Tiongkok. Pasca berakhirnya Perang Dingin pada tahun 1990-an antara AS dan Uni Soviet dengan ditandai bubarnya Negara Uni Soviet, maka praktis AS menjadi satu-satunya Negara Adidaya kala itu. Seiring berjalannya waktu, Tiongkok dengan sumber pendanaan yang tidak terbatas muncul menjadi pesaing baru AS sebagai Negara *Super Power* melalui kekuatan ekonomi dan militernya. Sehingga terjadilah persaingan perebutan pengaruh antara AS dan Tiongkok terhadap Negara-negara di seluruh penjuru dunia.

Pada tiga Perang sebelumnya, yaitu Perang Dunia I, Perang Dunia II, dan Perang Dingin Negara AS selalu muncul sebagai pemenangnya. Sehingga tidak mengherankan jika AS memiliki pengaruh yang begitu besar dalam hubungan internasional dan terkesan mengendalikan organisasi-organisasi internasional. Kala itu AS tidak hanya kuat di bidang militer tetapi juga sangat kuat di bidang ekonomi. Dalam usahanya menanamkan pengaruh dan hegemoni, AS pernah mengeluarkan kebijakan *Marshal Plan* yaitu program bantuan pinjaman dana bagi Negara-negara yang hancur akibat Perang Dunia. Kemudian, AS juga membangun banyak pangkalan-pangkalan militer di seluruh penjuru dunia dengan dalih sebagai penjamin keamanan dunia, termasuk di Filipina⁷.

⁷ Salim, Y. (2018, April 29). *Sekutu-Sekutu AS Ikut Megaproyek OBOR China*. Retrieved Juni 9, 2019, from

Saat ini, pola yang sama juga sedang dilakukan oleh Tiongkok. Negara Tiongkok dalam Dekade terakhir ini memang mengalami peningkatan yang signifikan dalam bidang ekonomi dan militer. Bahkan, saat ini pertumbuhan ekonomi Tiongkok adalah nomor satu di dunia. Tiongkok berupaya menanamkan pengaruh terhadap Negara-negara berkembang dan tertinggal dengan bantuan dan kerja sama dalam bidang ekonomi. Terutama dibawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping, Negara Tiongkok sangat gencar melakukan kebijakan tersebut. Tiongkok dibawah Presiden Xi Jinping mengeluarkan gagasan besar yaitu *One Belt One Road (OBOR)* dimana kebijakan ini adalah ingin mengajak Negara-negara di dunia untuk menghidupkan kembali jalur perdagangan Sutra kuno, baik melalui jalur darat maupun laut.

Dalam upaya merealisasikan gagasan tersebut, Tiongkok membentuk *Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)* untuk pendanaannya. Melalui program OBOR dan AIIB ini lah Tiongkok masuk menanamkan pengaruhnya terhadap Negara-negara berkembang dan tertinggal. Presiden Duterte yang baru menjabat sebagai Presiden Filipina pada akhir Juni 2016 tentu saja sangat mengetahui bahwa Filipina akan terseret dalam arus perebutan hegemoni dan pengaruh antara Tiongkok dan AS ini. Filipina secara historis dan geografis memang memiliki posisi yang menarik sehingga bisa menjadi modal yang baik bagi Tiongkok maupun AS jika berhasil menanamkan pengaruhnya di Filipina⁸.

<https://www.voaindonesia.com/a/sekutu-sekutu-as-ikut-megaproyek-obor-china-/4895361.html>

⁸ LEMA, K., & PETTY, M. (2018, November 19). *Two years after Philippines 'divorced' U.S., President Rodrigo Duterte still waiting on China dividend*. Retrieved April 28, 2019, from <https://www.japantimes.co.jp/news/2018/11/19/asia-pacific/politics->

Setelah mengalami proses panjang selama 40 tahun setelah reformasi, membuat Tiongkok menjadi negara *great power* yang diperhitungkan secara ekonomi, militer dan politik, baik di tingkat Asia maupun global. Ketrampilan Pemerintahan Tiongkok dalam membuat kebijakan ekonomi dan politik, nampaknya menantang persepsi masyarakat global bahwa Komunisme telah kehilangan konteks dalam politik global kontemporer. Kebangkitan Tiongkok, memaksa masyarakat dunia untuk merevisi persepsi tentang Komunisme. Sejarah membuktikan bahwa saat ini Tiongkok merupakan kekuatan ekonomi dan politik dunia yang proses kebangkitannya sulit untuk dibendung.

Di sisi lain, Asia Tenggara, tetangga geografis di sisi selatan Tiongkok merupakan kawasan yang sedang berkembang. Dinamika politik internasional di kawasan ini, tidak bisa dilepaskan dari konteks yang lebih luas yaitu kebangkitan Tiongkok. Arah, proses, dan tantangan lain terkait dinamika struktur kekuasaan di Asia Tenggara penting untuk dipahami terutama terkait dengan upaya membangun masa depan kawasan. Tiongkok saat ini, sejatinya memiliki akar sejarah yang sangat panjang. Dinasti-dinasti Tiongkok yang muncul dan tumbang dalam rentang ribuan tahun mewariskan diskursus identitas Tiongkok sebagai "*the middle kingdom*" yang kokoh, sehingga bentuk Negara Republik yang dipilih sebagai perwujudan Tiongkok saat ini memiliki identitas yang panjang melintasi zaman.

Menariknya kebanggaan sebagai bangsa Tiongkok, diterjemahkan dengan sangat kreatif dan kontekstual dalam konteks global yang selama ini telah dibentuk oleh Barat (Eropa dan Amerika). Salah satu produk kreatif orisinilnya barangkali

adalah kombinasi ideologi politik Komunisme dan kebijakan ekonomi Kapitalis. Sulit disangkal, kebijakan beserta warisan kebesaran sejarah, memiliki pengaruh yang tidak sedikit dalam proses pembentukan Tiongkok modern.

Selain, faktor sejarah dan kecerdikan dalam formulasi kebijakan tersebut, kebangkitan Tiongkok, turut dibentuk oleh populasinya yang secara kuantitas merupakan terbesar di dunia, dengan jumlah lebih dari 1,3 milyar, namun juga kultur dagang yang mapan yang diwariskan secara turun temurun. Serta distribusi diaspora yang meluas di seluruh benua. Keberadaan etnis Tiongkok di manca Negara dalam perkembangannya turut berperan dalam mewarnai dinamika kebangkitan Tiongkok. Peran yang lazim dijalankan oleh diaspora, selain mempromosikan budaya Tiongkok yang paling kasat mata adalah peran ekonomi. Perluasan pasar aneka produk dan jasa Tiongkok di luar negeri, gelombang investasi baik yang menuju (*inward*) maupun keluar (*outward*) Tiongkok, hingga proses kontruksi yang dibangun di daerah-daerah diaspora merupakan bagian dari aktivitas sosial, budaya, ekonomi dan politik yang menyusun puzzle kebangkitan Tiongkok setelah dipantik oleh serangkaian kebijakan strategis China, seperti *the Belt and Road Initiative*.

Salah satu implikasi politik dari kebangkitan Tiongkok bagi Asia Tenggara adalah pergeseran struktur kekuasaan di kawasan ini. Paska keruntuhan Uni Soviet (1989), Amerika menjadi satu-satunya great power yang tersisa di dunia. Eropa sebagai benua di mana Negara-negara kuat berada, masih berjuang untuk bangkit dari kehancuran akibat Perang Dunia II. Sementara itu Tiongkok masih jauh dari menjadi kekuatan yang diperhitungkan. Percaturan politik global tersebut memposisikan

Amerika Serikat dengan sendirinya sebagai kekuatan *Super Power*, tak terkecuali di Asia Tenggara. Terlebih lagi, persekutuannya dengan Jepang yang sedang gencar-gencarnya membangun investasi di Asia Tenggara, membuat Amerika Serikat memiliki mitra yang sangat bisa diandalkan dalam melanggengkan hegemoni di kawasan tersebut.

ASEAN+3 merupakan kerjasama multilateral yang disepakati pada tahun 1997, di mana Tiongkok merupakan salah satu Negara yang terlibat (di luar ASEAN) bersama Korea Selatan dan Jepang. Hal ini merupakan perwujudan konkrit dari kerjasama ASEAN-Tiongkok. Sementara kerjasama selanjutnya yang lebih spesifik (merujuk pada keterlibatan kedua belah pihak) adalah ACFTA (*ASEAN-China Free Trade Agreement*) yang diteken pada 2002. Singkatnya Tiongkok dalam setidaknya 9 tahun terakhir selalu masuk ke dalam top 10 *partner* dagang ASEAN, selain top 10 sumber investasi ASEAN. Terdapat dua peristiwa penting yang menunjukkan pergeseran kekuasaan di kawasan Asia Tenggara sebagai implikasi kebangkitan Tiongkok.

Pertama, tingginya nilai investasi Tiongkok di Asia Tenggara akhir-akhir ini secara umum, terutama terkait dengan proyek infrastruktur. *Kedua*, pergeseran orientasi kebijakan luar negeri Filipina dan Vietnam dalam konteks isu Laut China Selatan (LCS). Filipina, yang merupakan mitra dekat Amerika Serikat sepanjang sejarah berdirinya sebagai Negara berdaulat, merupakan salah satu dari Negara yang terlibat dalam konflik klaim. Sebelum era Presiden Duterte, Filipina merupakan pihak yang cukup kuat dalam memperjuangkan posisinya dalam sengketa perairan tersebut.

Filipina merupakan Negara bekas koloni AS yang sempat diduduki oleh AS selama puluhan tahun lamanya. Meskipun memiliki rasa ketidaksukaan

terhadap AS, tetapi nyatanya Filipina tetap menjadi sekutu terdekat AS di kawasan Asia Tenggara. Filipina selalu membutuhkan AS baik dalam bidang ekonomi melalui pinjaman hutang luar negerinya maupun militer melalui hibah maupun pembelian alat-alat perangnya dan latihan militer bersama. Di sisi lain, Tiongkok pada beberapa tahun terakhir menunjukkan kekuatan ekonomi dengan pinjaman lunak dan bunga ringan bagi Negara-negara berkembang, sehingga membuat Presiden Duterte tertarik untuk bergabung dalam proyek ambisius OBOR dan pendanaan dari AIIB sehingga sangat menarik bagi Tiongkok jika akhirnya berhasil menanamkan pengaruh di Filipina⁹.

Selain itu, Tiongkok juga menunjukkan kekuatan militernya dengan menempatkan tentaranya di wilayah sengketa Kepulauan Spartley di Laut China Selatan. Bahkan, saat ini Tiongkok juga sedang membangun Pulau reklamasi yang nantinya akan dijadikan sebagai pangkalan militernya untuk mengontrol perlintasan di wilayah Laut China Selatan. Filipina termasuk Negara yang bersengketa dengan Tiongkok atas wilayah yang diklaim oleh Tiongkok secara sepihak tersebut. Dalam gugatannya ke Mahkamah Internasional pun Filipina memenangkan gugatan yang menyatakan bahwa Tiongkok tidak berhak untuk mengelola wilayah sengketa di Kepulauan Spartley sebelum adanya keputusan bersama Negara-negara yang bersengketa.

Dalam sengketa wilayah Laut China Selatan (LCS) itu sebetulnya ini AS sebenarnya juga memiliki kepentingan sendiri. Hal tersebut karena kapal-kapal dagang AS merupakan salah satu yang

⁹ Huang, C. (2016, April 15). *57 nations approved as founder members of China-led AIIB*. Retrieved Juni 9, 2019, from <https://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/1766970/57-nations-approved-founder-members-china-led-aiib>

terbanyak melintasi wilayah tersebut, sehingga wilayah tersebut menjadi penting bagi perekonomian AS. Tetapi hal berbeda ditunjukkan oleh Presiden Duterte dari pendahulunya yaitu Presiden Benigno Aquino III yang sangat menentang pendudukan Tiongkok atas wilayah Laut China Selatan. Kebijakan yang diambil oleh Presiden Duterte lebih kompromis dan berusaha untuk menguatkan hubungan dengan Tiongkok.

Di sisi lain, Vietnam yang Komunis justru merapatkan diri ke Amerika Serikat yang Kapitalis. Presiden Obama pada 2016 mengakhiri embargo penjualan senjata ke Vietnam dan untuk kali pertama pada 2017 Vietnam mengimport senjata dari AS. Pengalaman sejarah perang dengan Tiongkok pada tahun 1979 (disamping konflik klaim di LCS) menjadi konteks relevan bagi perilaku Vietnam tersebut. Dari sudut pandang Vietnam, Amerika merupakan satu-satunya Negara yang dapat diharapkan untuk membendung ekspansi Tiongkok. Kedua peristiwa tersebut, menjadi indikator meyakinkan bahwa Tiongkok telah meningkatkan pengaruhnya secara signifikan di Asia Tenggara. Sehingga sejarah dominasi AS di kawasan ini mulai bergeser dan Asia Tenggara telah memasuki fase baru struktur kekuasaan. Asia Tenggara hari ini tidak lagi berada dalam bayang-bayang hegemoni Amerika Serikat. Kebangkitan Tiongkok merubah peta struktur kekuasaan di Asia Tenggara, dari yang sebelumnya berbasis hegemoni Amerika Serikat, sekarang telah memasuki fase perimbangan kekuatan (*balance of power*) paska kebangkitan Tiongkok.

2. Filipina Berada di Persimpangan Jalan

Sebelum era Presiden Duterte, hubungan Filipina dan AS sangat erat. Hal tersebut dibuktikan dengan kerjasama-kerjasama yang dijalin kedua Negara

tersebut. Pada Desember tahun 2012, Asisten Menlu AS untuk wilayah Asia Pasifik, Kurt Campbell, Asisten Menhan AS bidang Keamanan Asia-Pasifik Mark Lippert, Dubes Filipina untuk AS Jose Cuisia, dan Pejabat Kemenlu Filipina Bidang Kebijakan Luar Negeri Erlinda Basilio melakukan pertemuan khusus yang menghasilkan sebuah rencana kerja yang akan membuka kerjasama yang lebih kuat dan erat antara kedua negara. Para pejabat mengatakan mereka sedang mengupayakan hubungan, pertahanan, kelautan, ekonomi, dan keterlibatan diplomatik yang lebih erat serta mendorong penegakan hukum. Kedua negara tersebut memiliki perjanjian pertahanan bersama selama lebih dari 50 tahun, di mana selalu ada kehadiran militer Amerika. Beberapa pangkalan militer Amerika di Filipina didirikan antara tahun 1898-1992. Sejak kedua negara menandatangani perjanjian kunjungan pasukan tahun 1999, terlihat lebih sering adanya kunjungan dan kehadiran militer Amerika di pelabuhan tersebut.

Wakil Menteri Pertahanan Filipina saat itu, Piolo Lorenzo Batino, mengatakan kunjungan tersebut mencakup penambahan pelatihan dan latihan untuk pasukan militer Filipina. Latihan itu akan diarahkan pada keamanan maritim, penanggulangan bencana dan kegiatan kemanusiaan. Kegiatan ini semakin dibutuhkan untuk memerinci konsep-konsep ini, guna meningkatkan kehadiran yang bergilir. Ini akan menjadi perkembangan yang sangat signifikan dalam hubungan kedua negara. Filipina mengatakan, mereka menghendaki posisi yang lebih baik untuk mempertahankan klaim di Laut Cina Selatan. Vietnam, Taiwan, Malaysia, dan Brunei juga memperjuangkan klaimnya, sementara Tiongkok menyatakan hampir seluruh wilayah laut itu adalah milik Tiongkok.

Pejabat Kementerian Luar Negeri Filipina awal mengatakan, Filipina memandang Amerika sebagai pihak yang dapat membantu menempatkan Filipina dalam posisi yang lebih baik. Selagi Amerika mempertahankan posisi netralnya dalam sengketa teritorial, mereka menyerahkan konsultasi pertahanan kepada Filipina sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Pertahanan Bersama. Asisten Departemen Luar Negeri Amerika Kurt Campbell yang menghadiri perundingan itu mengatakan hubungan kedua negara "mengalami kemajuan" dan memperkuat strategi, politik, ekonomi dan militer dalam beberapa tahun terakhir. Ia menekankan kedua negara perlu bekerja sama sebagai mitra yang setara¹⁰.

Sebelumnya, Filipina merupakan koloninya Amerika Serikat. Secara historis, hubungan antara Amerika Serikat dan Filipina sangat kuat dan digambarkan sebagai sebuah hubungan khusus. Filipina adalah salah satu mitra AS yang tertua serta sekutu non-NATO utama dan strategis. Amerika Serikat secara konsisten disebut-sebut sebagai salah satu negara favoritnya Filipina, dengan 91 persen orang Filipina menyukai Amerika pada tahun 2002, 90 persen dari Filipina melihat pengaruh AS dengan positif pada tahun 2011. Bahkan tahun 2013, 85 persen orang Filipina menyukai orang-orang AS dan 92 persen orang Filipina memandang AS dengan baik di 2015, dan 89% memiliki kepercayaan pada presiden Amerika Serikat, Barack Obama, pada

¹⁰ Orendain, S. (2012, Desember 13). *Filipina dan AS Pererat Hubungan Diplomatik dan Pertahanan*. Retrieved Juni 14, 2019, from <https://www.voaindonesia.com/a/filipina-dan-as-pererat-hubungan-diplomatik-dan-pertahanan/1563872.html>

tahun 2014, membuat Filipina menjadi negara paling pro-Amerika di dunia¹¹.

Dalam hubungan internasional, sebuah Negara tentu saja mengharapkan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dalam menjalin hubungan kerjasama baik itu kerjasama bilateral maupun multilateral. Cara yang dapat dilakukan untuk membuat kebijakan ataupun keputusan luar negeri menurut Coplin yaitu harus memahami peta kekuatan dan fenomena dari konteks internasional itu sendiri. Filipina saat ini merasa berada di persimpangan jalan karena di satu sisi AS adalah sekutu utama mereka dan telah menjalin kerjasama erat selama puluhan tahun baik dalam bidang ekonomi maupun militer. Sedangkan Tiongkok adalah kekuatan baru dunia yang muncul dengan gagasan ekonomi yang sangat menggiurkan bagi Negara-negara berkembang seperti Filipina untuk memajukan infrastruktur dan ekonomi di negaranya. Dalam bidang militer pun Filipina juga sangat kalah dibanding Tiongkok, sehingga bersitegang dalam konflik di laut Cina Selatan pun hanya akan merugikan Filipina itu sendiri.

Hal ini lah yang sepertinya dibaca oleh Presiden Duterte, sehingga secara pelan-pelan berusaha membawa Filipina untuk melepaskan diri dari ketergantungan seutuhnya terhadap Filipina terutama dalam bidang ekonomi dan militer. Presiden Duterte berusaha untuk bermain dua kaki, yaitu dengan tidak meninggalkan hubungan dan kerja sama dengan AS seutuhnya tetapi juga menjajaki hubungan kerja sama yang intens dengan Tiongkok. Sikap Tiongkok yang menyatakan dukungan pada Filipina dalam perang melawan Narkoba dan disampaikan langsung

¹¹ Global Indicators Database. (2014). *Global Indicators Database*. Retrieved Juni 15, 2019, from <https://www.pewresearch.org/global/database/>

oleh Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Geng Shuang mengatakan Tiongkok mengerti dengan kebijakan Presiden Duterte meski banyak dikritik Barat. Dilansir dari *Asian Correspondent* membuat Presiden Duterte senang, kebijakan Tiongkok ini berkebalikan dengan kebijakan AS yang mengkritik kebijakan Presiden Duterte tersebut.

Kemudian Presiden Duterte berkunjung ke Tiongkok pada tahun 2017. Pada saat itu Presiden Duterte membawa sejumlah besar delegasi, sekitar 250 eksekutif bisnis. Presiden Duterte bertemu dengan Presiden Xi Jinping, PM Li Keqiang dan Ketua Kongres Zhang Dejiang. Selain itu, Presiden Duterte juga sowan dengan komunitas Filipina yang tinggal di Cina. Pertemuan tersebut bertujuan meningkatkan hubungan bilateral. Sejumlah agenda yang dibahas meliputi ekonomi, bisnis dan perjanjian investasi. Duta Besar Cina untuk Filipina, Zhao Jianhua pada Rappler sempat mengatakan bahwa kedua pemimpin tidak membahas isu Laut Cina Selatan.

Hasil dari kunjungan tersebut adalah Filipina menerima tawaran investasi dari Tiongkok dalam bidang infrastruktur yang juga masuk dalam rangkaian rencana proyek OBOR jalur laut. Presiden Duterte seperti menyadari bahwa Filipina tidak akan bisa melawan Tiongkok dari segi ekonomi maupun militer dalam hal perebutan wilayah sengketa di Laut China Selatan. Sehingga jalan terbaiknya adalah bekerjasama agar bisa merundingkan agar setiap Negara mendapatkan keuntungan yang sama dan tidak ada yang merasa dirugikan. Hal tersebut juga disampaikan oleh Presiden Duterte dalam forum ASEAN agar ASEAN melibatkan Tiongkok dalam

pembuat *code of conduct* dalam penyelesaian sengketa di Laut China Selatan¹².

Kepentingan nasional Negara tentu saja menjadi tujuan seluruh Negara dalam menjalin hubungan maupun kerja sama internasional. Hal tersebut pula yang sedang diperjuangkan oleh Presiden Duterte. Ia ingin negaranya tidak didikte oleh Negara manapun, sehingga Ia membuat kebijakan untuk sedikit menarik diri dari sekutu lamanya AS dan berusaha untuk membuka diri terhadap kemungkinan-kemungkinan kerja sama yang akan dilaksanakan dengan Tiongkok. Hal ini lah yang menimbulkan gejolak dan ketidakharmonisan hubungan AS dan Filipina di era Presiden Duterte. Meskipun Kepemimpinan AS tela berganti dari Presiden Obama ke Presiden Donald Trump yang juga setipe dengan Presiden Duterte nyatanya tidak membuat Presiden Duterte berubah pikiran begitu saja dan tetap bermain di dua kaki dalam hubungan Filipin dengan AS dan Tiongkok¹³.

¹² Koran Sindo. (2017, November 17). *Soal Laut China Selatan, China-Filipina Sepakat Hindari Konflik*. Retrieved April 28, 2019, from <https://international.sindonews.com/read/1258302/40/soal-laut-china-selatan-china-filipina-sepakat-hindari-konflik-1510910586>

¹³ China News. (2017, Mei 12). *Rodrigo Duterte: Inisiatif 'One Belt One Road' Bakal Perluas Hubungan Ekonomi dan Dagang Filipina-Tiongkok*. Retrieved April 28, 2019, from <http://indonesian.china.com/news/asia/985/20170512/963892.html>